

KOMUNIKASI POLITIK PAGUYUBAN PASUNDAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2008

Adiyana Slamet

Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Komputer Indonesia,
Jalan Dipati Ukur 114 – 116, Bandung, 40132, Indonesia

Email: vivere_adi@yahoo.co.id

Abstrak

Eksistensi dan peran politik Paguyuban Pasundan semakin terlihat ketika terjadi proses politik ditingkat lokal seperti pemilihan gubernur secara langsung di Provinsi Jawa Barat tahun 2008. Namun eksistensi dan peran politik tersebut tetap saja ada kendala, salah satunya adalah komunikasi politik yang terbangun didalam interen organisasi dalam pertukaran simbol-simbol tidak ada pemaknaan yang bisa dijadikan acuan untuk memutuskan sikap politik. Sehingga menjadi menarik Pengurus Besar Paguyuban tersebut untuk diteliti, terbukti bahwa dua dari tiga kandidat calon gubernur adalah anggota Dewan Pengaping Pengurus Besar Paguyuban Pasundan. Penelitian ini Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mengungkap model dan kategori komunikasi politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan gubernur secara langsung di Provinsi Jawa Barat tahun 2008. Sehingga penelitian ini dapat menghasilkan model dan kategori komunikasi politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam Pemilihan Gubernur Langsung Provinsi Jawa Barat Tahun 2008. Budaya komunikasi politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan gubernur secara langsung di Provinsi Jawa Barat tahun 2008, yang terbangun adalah budaya komunikasi politik cenderung tidak terbuka dan terbentuk budaya komunikasi politik yang sulit terungkap sehingga komunikasi politik penuh dengan penghalusan (*eufemisme*) sehingga proses komunikasi politik yang terjadi bias walaupun sudah menjadi keputusan politik Paguyuban Pasundan. Kemudian budaya yang berkembang dalam Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan Gubernur secara langsung di Jawa Barat tahun 2008 tergolong ke dalam pengertian budaya komunikasi *ewuh pakewuh*. Realitas politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam Pilgub Jawa Barat 2008, nampak jelas bahwa komunikasi politik yang dilakukan Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2008 dalam menghubungkan pikiran-pikiran politik yang terjadi di dalam tubuh Paguyuban Pasundan itu sendiri tidak ada persamaan makna, maka yang terjadi terkesan adanya konflik atau friksi, hasil observasi langsung bahwa itu terlihat dua elit Pengurus Besar Paguyuban Pasundan masing-masing mempunyai sikap politik yang berbeda sehingga terjadi ambiguitas dalam memutuskan sikap politik organisasi

Abstract

The existence and political role of Paguyuban Pasundan is more seeing when the political process happens on local level such as gubernatorial election in West Java Province years 2008. The existing and the political role still have a problem, one of them is the political communication that builds inside the internal of organization there is no significance on symbols trade that can be a point to decide a political attitude. It is becoming interesting to research Paguyuban Pasundan, it's been proved by the two of three gubernatorial candidates is the member of Paguyuban Pasundan. This research involves a qualitative approach by a case study to reveal the model and the category of political communication Paguyuban Pasundan on gubernatorial election in West Java Province years 2008. This research can make a model and political communication category of Paguyuban Pasundan on gubernatorial election in West Java Province years 2008. The political communication culture of Paguyuban Pasundan in gubernatorial election, kindly disposes toward is not open, and the political communication shapeless, so the political process biased even though it has been the political decision of Paguyuban Pasundan. The growing culture in Paguyuban Pasundan on gubernatorial election in West Java Province years 2008 is on 'ewuh pakewuh' culture. Political reality Paguyuban Pasundan on gubernatorial election, is clearly connected the political minds that happen on Paguyuban Pasundan it self doesn't have a same meaning, so what happens it seems like there is a conflict, the result of direct observation is two elites of Paguyuban Pasundan members each have a different political attitude that occurs the ambiguity on decide the political attitude of organization.

Keywords : Political Communication, Paguyuban Pasundan, Governor Election

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Komunikasi politik merupakan aktivitas pesan orang-orang yang melakukan kegiatan politik, dalam bentuk mempengaruhi dan menstimulus orang lain untuk melakukan kegiatan politik, baik pada tingkatan hubungan antar suprastruktur dan infrastruktur. Pesan itu berlangsung untuk mengikuti perubahan dan perkembangan informasi yang diinginkan dalam masyarakat. Sang aktor atau komunikator politik dan bisa juga disebut sekaligus partisipan politik dapat mengerti bahwa isi, tujuan dan keinginan pesan politik yang disampaikan adalah untuk mempengaruhi dan membentuk opini publik.

Pesan politik akan membentuk opini masyarakat dalam momentum politik, apalagi pemilihan kepala daerah langsung di Provinsi Jawa Barat merupakan momen pertama bagi masyarakat. Hal ini komunikasi politik menjadi penting karena proses pemilihan kepala daerah langsung bersinggungan dengan partisipasi politik, pendidikan politik, perilaku dan sikap politik, apabila orang atau kelompok baik suprastruktur maupun infrastruktur yang terlibat dalam kegiatan politik, melakukan sosialisasi pesan mereka untuk menstimulus dan mempengaruhi orang atau kelompok lain agar mengikuti atau menolak tujuan suatu kelompok dalam pemilihan kepala daerah yang bersifat persuasif, kohesif atau mungkin refresif. Gejala ini sering tumbuh dalam masyarakat yang sedang menghadapi momen politik seperti pemilihan kepala daerah langsung.

Dalam menciptakan iklim atau situasi yang kondusif dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah langsung yang lebih luas, sosialisasi pesan politik diperlukan proses sosialisasi terlebih dahulu sehingga aktor dapat memberikan stimulus pesan politik pada publik untuk dapat diterima oleh khalayak sasaran. Sosialisasi pesan politik menjadi penting dalam komunikasi politik akibat ada usaha dari kelompok masyarakat, ini dipertegas oleh pendapat Robinson oleh Alexis S. Tan (Harun dan Sumarno, 2006 : 82) mengatakan bahwa: "Sosialisasi politik merupakan proses perubahan perilaku yang berhubungan erat dengan proses belajar, dalam proses ini terjadi penyetaraan pemahaman terhadap segala peristiwa politik."

Untuk mensosialisasikan pesan itu dibutuhkan wacana konseptual yang dapat menumbuhkan partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Barat. Salah satu bentuk sosialisasi pesan-pesan politik hal ini terlihat dalam pemilihan gubernur secara langsung di Jawa Barat, bentuk sosialisasi pesan-pesan politik itu antara lain: Gubernur Jawa Barat harus orang Sunda asli, Gubernur ke depan harus yang tahu seluk beluk Jawa Barat atau berpengalaman dan ada juga yang mengatakan bahwa Jawa Barat harus kembali dipimpin oleh purnawirawan Tentara Nasional Indonesia.

Kesalahan memberi arti pesan politik dalam momen politik seperti pemilihan kepala daerah langsung berdampak pada propaganda dan terlibat perselisihan politik dengan orang yang merasa dirugikan, karena propaganda dimuat di media massa maka propaganda tersebut lebih mudah berkembang dalam masyarakat, kelompok yang mempunyai kepentingan dalam pemilihan kepala daerah akan melakukan *counter* propaganda yang memungkinkan terjadi perpecahan ditingkat masyarakat, hal ini sangat mungkin terjadi dalam momen politik pemilihan kepala daerah langsung di Jawa Barat.

Dalam hal pemilihan gubernur langsung di Jawa Barat yang digelar pada tahun 2008 dengan jumlah pemilih menurut data KPU Provinsi Jawa Barat berjumlah 27.972.924 orang

dengan jumlah penduduk 39.960.869 yang tersebar di 26 kabupaten dan kota. Pemilihan Gubernur secara langsung ini merupakan tonggak sejarah demokrasi terpenting di Jawa Barat, ini merupakan kelanjutan dari proses pemaparan demokrasi yang telah dibangun dalam skala nasional melalui pelaksanaan pemilu sebelumnya, terutama pemilu tahun 1955, 1999 dan 2004. Pemilihan Gubernur secara langsung ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dengan aturan yang berbeda. Pemilihan Presiden berdasarkan pada Undang-Undang pemilu, sedangkan pemilihan Gubernur secara langsung berpijak pada Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun dari substansi demokrasi, kedua pemilihan pejabat eksekutif di pusat dan di daerah tersebut mempunyai landasan pemikiran yang sama, yaitu bagaimana kedaulatan rakyat secara langsung dapat terwujud dengan besarnya peran serta masyarakat dalam pemilihan Presiden secara langsung di pusat maupun pemilihan kepala daerah secara langsung di daerah. Menurut data *desk* pemilihan kepala daerah langsung Departemen Dalam Negeri sepanjang 2008 ada 256 daerah di seluruh tanah air yang akan melaksanakan perhelatan demokrasi lokal yaitu pemilihan kepala daerah langsung. Jawa Barat merupakan salah satu dari 256 daerah yang memilih Gubernurnya.

Dalam menghadapi peristiwa politik pemilihan Gubernur secara langsung komunikasi politik mempunyai peranan besar di dalamnya baik itu yang dilakukan oleh individu maupun kelompok di dalam struktur masyarakat, dalam momentum pemilihan Gubernur secara langsung juga mendorong masyarakat untuk berperan aktif di dalamnya.

Proses komunikasi politik menghadapi peristiwa politik seperti pemilihan Gubernur secara langsung dibutuhkan figur individu maupun kelompok yang mampu memberikan dorongan agar masyarakat dapat berperan aktif. Tujuannya untuk menstimulus atau memotivasi pendapat umum atau terwujudnya partisipasi politik, pendidikan politik, dan perilaku politik serta dapat mengelola pesan politik secara bijaksana sesuai kebutuhan dalam pemilihan Gubernur secara langsung di Jawa Barat. Dalam peristiwa politik seperti pemilihan Gubernur secara langsung yang mempunyai peran yang cukup dominan adalah pada level infrastruktur.

Dalam mengkaji permasalahan ini maka Pengurus Besar Paguyuban Pasundan ada pada ranah atau level komunikator infrastruktur politik yang menarik untuk diteliti dalam pemilihan Gubernur secara langsung di Jawa Barat.

Keberadaan Paguyuban Pasundan dalam sejarah ditingkat nasional maupun ditingkat lokal telah membuktikan bahwa Paguyuban Pasundan menjadi kelompok yang mempunyai fungsi yang dapat mempengaruhi masyarakat dan mempengaruhi para pejabat yang mengambil kebijakan dalam berbagai masalah sosial, politik, budaya maupun pendidikan peranan Pengurus Besar Paguyuban Pasundan juga paling tidak dalam pemilihan Gubernur secara langsung di Jawa Barat akan terasa karena dalam perjalanan waktu Pengurus Besar Paguyuban Pasundan adalah entitas yang ada di Jawa Barat dan selalu memperhatikan masalah-masalah sosial, politik, budaya maupun pendidikan dengan mengacu pada nilai-nilai kesundaan.

Dalam pemilihan Gubernur secara langsung di Jawa Barat tahun 2008 menjadi penting untuk diteliti guna mengetahui bagaimana komunikasi politik yang dilakukan Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan Gubernur secara langsung di Provinsi Jawa Barat yang akan diselenggarakan pada tahun 2008 ini? Karena menurut peneliti Pengurus Besar Paguyuban Pasundan merupakan komunikator infrastruktur dalam komunikasi politik sehingga Pengurus Besar Paguyuban Pasundan memainkan peran yang jauh lebih aktif dibanding dengan masyarakat pada umumnya yang ada di Jawa Barat

1.2. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengkaji proses komunikasi politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan Gubernur Langsung di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008.
- 2) Untuk mengkaji budaya komunikasi politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan Gubernur Langsung di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008
- 3) Untuk mengkaji faktor-faktor apa yang mendasari komunikasi politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam Pemilihan Gubernur Langsung Provinsi Jawa Barat Tahun 2008

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1. Konsep Pembahasan Komunikasi Politik

Dalam mewujudkan tujuan politik, komunikasi mempunyai peranan yang penting sebagai instrumen penghubung dalam aktivitas politik. Harus diakui bahwa tidak akan tercapai tujuan dalam sistem politik, tanpa diikuti kegiatan komunikasi terlebih dahulu. Begitu juga sebaliknya, komunikasi akan berproses pada tujuan politik, apabila pesan yang disampaikan mengandung makna yang sama pada orang yang mengikuti arus politik.

Komunikasi dan politik merupakan dua kata yang berbeda, tetapi dapat menjadi satu paradigma dalam pengamatan terhadap proses politik di masyarakat. Orang sering menyebut komunikasi politik yang merupakan proses pertukaran pesan antar orang yang melakukan kegiatan politik, sebagai aktor dengan arah dan tujuan pesan telah ditentukan oleh tatanan mekanisme yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, Golding (1986) mengatakan bahwa: "Komunikasi politik sebagai pandangan pesimistik yang menceritakan terhadap muatan politik sebagaimana terdistribusi dalam berbagai bentuk melalui media massa terhadap sebagian besar *audiens* yang didominasi pada berbagai sumber dengan cakupan kepentingan media itu sendiri, bukan kepentingan warganegara atau proses demokratis. Terhadap ruang lingkup terbatas bagi para komunikator massa dalam menambahkan unsur-unsur atau bumbu-bumbu politik, karena batasan-batasan yang telah disebutkan atau karena meningkatkan pengaruh norma-norma objektivitas politik. Pengaruh terlalu kuat dari tampilan mendapatkan perhatian dalam arah liputan politik telah didokumentasikan, seperti dalam ketidakseimbangan waktu dan ruang yang ditunjukkan pada prosedur dan personalitas-personalitas dibandingkan dengan masalah-masalah substansi politik. Dalam pengertian lain komunikasi politik berarti citra rasa mengenai berita-berita tentang politik serta sebab-sebab utama yang harus dibentuk dalam suatu kombinasi, sosialisasi melalui media dan struktur sosial."

Proses komunikasi politik dalam sebuah struktur dan tatanan etika politik masyarakat dipengaruhi oleh berbagai informasi yang berkembang dalam masyarakat. Hal itu antara lain menyangkut penyebaran isu politik yang dikembangkan melalui propaganda dalam masyarakat, dan dipengaruhi dengan simbol politik yang ada. Dengan mengedepankan propaganda politik, komunikasi mampu membentuk opini masyarakat agar berperilaku sesuai dengan keinginan aktor politik. Akhirnya ada orang menganggap komunikasi politik cenderung berorientasi pada propaganda politik sebagai sumber informasi, Laswell (dalam Varma, 2001:273) menjelaskan bahwa: "Propaganda sebagai penggunaan simbol-simbol

untuk mempengaruhi perilaku kontroversial, sehingga dia percaya bahwa propaganda yang sama dengan manipulasi perasaan manusia, diperlukan baik dalam masa perang maupun damai, dan memandang hal ini sebagai satu dari empat instrumen utama kebijakan perang dan damai, tiga instrumen lain adalah diplomasi, senjata, dan ekonomi.”

Ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh aktor politik dalam penyampaian pesan, apalagi menghadapi momen politik, Nimmo (2000:36) menyebutkan bahwa: “*Pertama*, terdapat juru bicara bagi kepentingan yang terorganisasi. Pada umumnya orang ini tidak memegang ataupun mencita-citakan jabatan pada pemerintahan; dalam hal ini komunikator tersebut tidak seperti politikus-politikus yang membuat politik menjadikan lapangan kerjanya. Juru bicara ini biasanya juga bukan profesional dalam komunikasi. Namun ia cukup terlibat dalam politik maupun dalam komunikasi sehingga dapat disebut aktivis politik dan semi profesional dalam komunikasi politik. *Kedua*, jaringan interpersonal mencakup komunikator politik utama, yakni pemuka pendapat. Sebuah badan penelitian yang besar menunjukkan bahwa banyak warga negara yang dihadapkan pada pembuatan keputusan yang bersifat politis (seperti memilih untuk calon apa) meminta petunjuk dari orang-orang yang dihormati mereka, apakah untuk mengetahui apa yang harus dilakukannya atau untuk memperkuat putusan yang telah dibuatnya. Orang yang diminta petunjuk dan informasinya itu adalah “pemuka pendapat.”

Komunikasi politik tersebut memperlihatkan hal-hal sebagai berikut: *Pertama*, dalam setiap proses politik dibutuhkan aktor yang tidak memperlihatkan kepentingan pribadi dalam setiap penyampaian informasi yang bersifat moral ataupun material, karena aktor politik menjadi lapangan kajian komunikasi politik. *Kedua*, penyampaian informasi dapat dikembangkan dengan membuka jaringan informasi interpersonal pada tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat sebagai simbol politik. Pesan komunikasi politik dapat menyentuh sasaran dengan memperhatikan berbagai pola perpolitikan dalam masyarakat. Dalam pandangan lain komunikasi politik dianggap sebagai sebuah atribut pesan, Burgoon (1982:748) mengatakan bahwa:

“Politik merupakan atribut umum seseorang yang menghasilkan variasi perilaku yang meliputi hubungan antar personal sebagaimana halnya komunikasi massa. Dengan kata lain aktivitas personal dalam ruang politik berimplikasi terhadap tindakan komunikasi. Media berita yang digunakannya harus dapat memfasilitasi atau mencapai kapasitas dalam bentuk komunikasi politik. Skala media yang digunakan berkorelasi positif dengan ukuran lainnya dari komunikasi politik.”

Pandangan teori ini melihat politik sebagai sebuah peralatan yang dimiliki setiap lapisan masyarakat, untuk menjelaskan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai komponen kehidupan, baik secara perorangan, kelompok maupun masa.

Komunikasi politik mempelajari mata rantai antara komunikasi dan politik atau jembatan metodologis antara disiplin komunikasi dan politik. Namun jika disimak dari berbagai literatur, komunikasi politik telah menjadi kajian tersendiri sejak diakui oleh organisasi ilmiah *International Communication Association* bersama divisi lain, seperti divisi sistem informasi, komunikasi antar pribadi, komunikasi massa, komunikasi organisasi, komunikasi antar budaya, komunikasi intruksional dan komunikasi kesehatan (Ardianto dan Q-Anees, 2007:35)

Lebih lanjut dikatakan Gazali bahwa komunikasi politik dalam pemilihan umum yaitu:

“(1) Komunikasi berisi informasi dan citra (kesan); (2) Informasi dalam Komunikasi Politik = *Prospective Policy Choices* (apa-apa saja kebijakan yang menguntungkan pemilih kalau memilih seorang kandidat), dan (3) Citra dalam Komunikasi Politik = *Image Making* (penguatan kesan atau memori bahwa seorang calon memang akan melaksanakan apa yang ia janjikan). Jadi Komunikasi Politik dalam Pemilu = Kompetisi memberikan informasi tentang kebijakan seorang kandidat yang menguntungkan pemilih + perlombaan membuat citra yang tertanam dimemori pemilih bahwa seorang kandidat akan lebih melaksanakan janjinya dibanding calon lain”.

Sebagai komunikator politik dari organisasi yang terstruktur Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Jawa Barat tahun 2008 berada pada posisi strategis untuk memainkan peranan politik dalam suatu setting politik tertentu. Menurut Nimmo (2000:72): ”Politisi sebagai komunikator politik memainkan peran sosial yang utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik. Politisi atau politikus berkomunikasi sebagai wakil suatu kelompok dan pesan-pesan politikus itu adalah untuk mengajukan dan atau melindungi tujuan kepentingan politik. Artinya, komunikator politik mewakili kepentingan kelompok, sehingga jika dirangkum maka politikus mencari pengaruh lewat komunikasi”

Blake dan Haroldson (1975:44) mengatakan “*Political communication is communication that has actual or potential effects on the functioning of a political state or the political entity*”.

Fagen (dalam Blake dan Haroldson, 1975:44) mendefinisikan bahwa komunikasi politik sebagai segala komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem itu dengan lingkungannya. Luas lingkungannya meliputi studi mengenai jaringan komunikasi organisasi (partai, serikat kerja, birokrasi publik, dan organisasi massa lain) kelompok, media massa, dan saluran-saluran khusus dan determinan sosial ekonomi dari pola-pola komunikasi yang ada pada sistem yang dimaksud. Komunikasi politik menurut Denton dan Woodward (dalam Mc Nair 1995:3-4) termasuk komunikasi dalam hal ihwal berikut ini:

1. *All forms of communication undertaken by politicians and other political actors for the purpose of achieving specific objectives;*
2. *Communication addressed to these actors by non-politicians such as voters and newspaper columnists, and;*
3. *Communication about these actors and their activities, as contained in news reports, editorials, and other forms of media discussion of Politics.*

Galnoort (dalam Nasution, 1989:24), menjelaskan bahwa komunikasi politik merupakan infra struktur politik, yakni suatu kombinasi dari berbagai interaksi sosial dimana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalamnya. Komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan pada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi itu dapat mengikat semua kelompok atau warganya melalui suatu sanksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Sementara bila dilihat dari tujuan politik *an sich*, hakikat komunikasi politik pada dasarnya adalah upaya sekelompok manusia yang mempunyai orientasi, pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan demi mewujudkan pemikiran politik dan ideologi sebagaimana yang mereka harapkan. Unsur-unsur dalam komunikasi politik pada umumnya terdiri dari: komunikator, komunikan, pesan, media, tujuan, efek, dan sumber komunikasi. Semua unsur ini berada dalam dua situasi politik atau struktur politik yakni suprastruktur politik, dan

infrastruktur politik. Suprastruktur politik termasuk legeslatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan infrastruktur politik mencerminkan kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat yang terdiri atas parpol, kelompok interest group, media komunikasi politik dan lain sebagainya (Harmoko dalam Rauf, 1993:10).

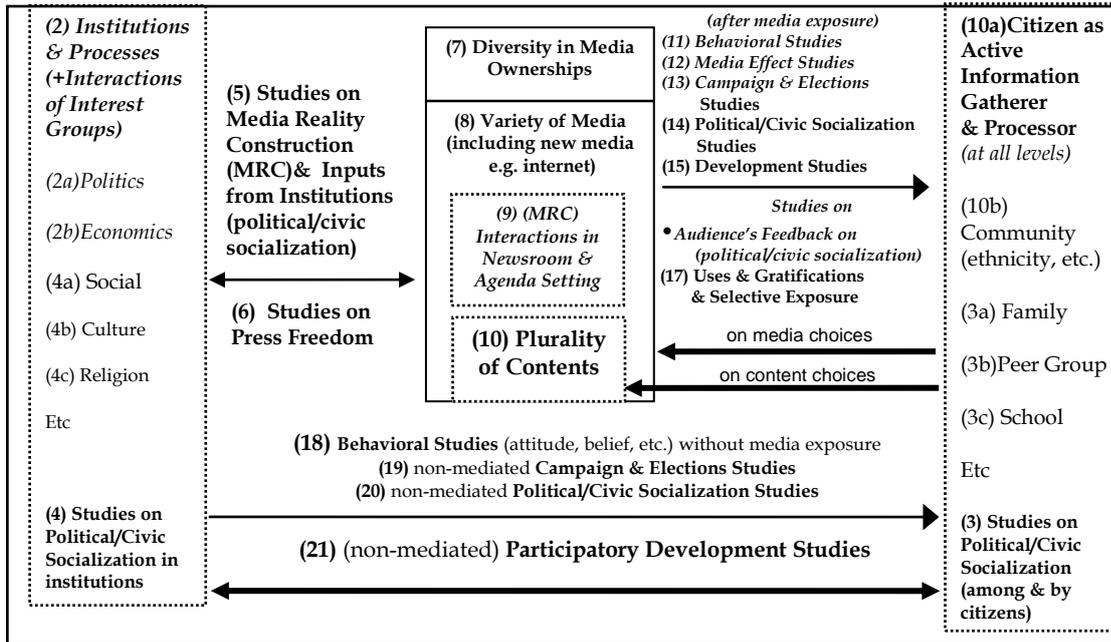
Komunikasi politik mempersambungkan semua bagian dari sistem politik, dan juga masa kini dan masa lampau, sehingga dengan demikian aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan. Komunikasi politik terjadi mulai dari proses penanaman nilai di masyarakat (sosialisasi politik atau pendidikan politik), sampai kepada pengartikulasian dan penghimpunan aspirasi dan kepentingan, terus kepada proses pengambilan kebijaksanaan, pelaksanaannya, dan penilaian terhadap kebijakan itu oleh masyarakat yang tiap-tiap bagian, itu dipersambungkan oleh komunikasi politik. Komunikasi politik sebagaimana dikatakan Michael Rush dan Philip Althoff (2002:22) menjadi bagian penting dari sosialisasi politik, partisipasi politik, dan perekrutan politik. Karenanya, komunikasi politik erat kaitannya dengan sosiologi politik. Sosiologi politik mempelajari mata rantai antara politik dan masyarakat, antara struktur sosial dan struktur politik, dan antara tingkah laku sosial dan tingkah laku politik.

Sesuai dengan pengertian, dan ruang lingkup kajian komunikasi politik di atas, fungsi komunikasi politik dalam sebuah negara demokrasi adalah partisipasi politik, pendidikan politik, menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik yang menjadi *input* pada sistem politik dan pada waktu yang sama ia juga menyalurkan kebijakan yang diambil penguasa berupa *output* dari sistem politik itu sendiri.

Dilihat dari ulasan berbagai teori sebelumnya, dapat dimengerti bahwa komunikasi politik merupakan sebuah paradigma yang dapat dilakukan pengkajian dalam peristiwa politik di masyarakat. Melalui komunikasi politik, orang dapat menjelaskan beberapa tentang hal-hal mengenai peristiwa politik (pemilihan kepala daerah langsung) sebab (1) komunikasi politik mampu menjelaskan pengaruh atau peranan kelompok masyarakat terhadap pesan yang disampaikan; (2) komunikasi politik dapat mengupas pesan dan bentuk opini untuk bertindak terhadap sikap politik saat peristiwa politik terjadi; dan (3) komunikasi politik dapat menciptakan model dukungan politik dalam pemilihan kepala daerah, dengan menganalisis arah pesan yang berkembang dalam masyarakat. Komunikasi politik di Indonesia akan semakin dipengaruhi pula oleh Amerika, baik sebagai kajian maupun dalam praktek sehari-hari. Apalagi literatur-literatur utama yang dipelajari oleh para ilmuwan komunikasi politik Indonesia kebanyakan berasal dari USA.

Menurut Gazali dalam penjelasan power point dengan judul strategi komunikasi politik memenangkan hati publik (dalam pilkada langsung) 2006, mengatakan bahwa "Komunikasi politik di era modern ini utamanya membahas tentang *mediated political communication*. Oleh karena itu, studi-studi tentang konstruksi realitas media (*media reality construction*) semakin menarik dan penting; termasuk analisis *agenda-setting* dan interaksi dalam redaksi. Semua itu adalah bagian dari apa yang disebut sebagai "*communications of politics*". Bagian lain yang tak dapat dipisahkan dari komunikasi politik adalah "*politics of communications*" yang perlu lebih banyak dikaji. Berdasarkan itu, Gazali kemudian merumuskan sebuah "*Model of the Political Communication Field*" Seperti yang tampak pada Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
A comprehensive Model of Political Communication Field
Based on the Indonesian contexts



(2)(9)(11)(12)(13)(14)(15)(17) : Traditional focuses (communication of politics),
 (3)(3a)(3b)(3c)(4)(4a)(4b)(4c)(18)(19)(20)(21) : New focuses (mostly non-mediated activities)
 (5)(6)(7)(8)(10)(10a)(10b) : New focuses (politics of communication)

Berdasarkan bagan di atas, tampaknya hasil penelitian Gazali dalam kajian komunikasi politik akan mengarah ke dalam riset-riset dalam bagian “*politics of communications*”. (Dalam bagan di atas, dicetak merah—red). Sedangkan dalam bagian “*communications of politics*”, kajian-kajian di masa akan datang akan lebih dipengaruhi oleh unsur psikologi sosial ketimbang komunikasi massa, sebab komunikasi yang *non-mediated* semakin mendapat perhatian. (Dicetak hitam)

2.2. Konsep Paguyuban

Manusia pada umumnya dilahirkan seorang diri, namun mengapa harus hidup bermasyarakat? Seperti diketahui manusia pertama Adam telah ditakdirkan untuk hidup bersama dengan manusia lain yaitu istrinya yang bernama Hawa. Banyak cerita-cerita tentang manusia yang hidup menyendiri seperti Robinson Crusoe (Soekanto. 1990:113), dalam hubungan antara manusia dengan manusia lain, yang paling penting adalah reaksi yang timbul sebagai akibat hubungan-hubungan dalam interaksinya, dalam memberikan reaksi tersebut ada suatu kecenderungan manusia untuk memberikan keserasian dengan tindakan-tindakan orang lain, oleh karena sejak dilahirkan, manusia sudah mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok yaitu: (1) keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya (yaitu masyarakat); (2) keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam disekelilingnya.

Dalam melihat kelompok sosial salah satu tipe kelompok sosial adalah paguyuban. Paguyuban dapat kita temui dalam fenomena kehidupan masyarakat, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi di dalam kehidupan sosial dan menginginkan suatu kehidupan yang harmonis dan kebutuhan batiniah untuk hidup bersma. Menurut kamus besar bahasa Indonesia paguyuban menyebutkan bahwa: Paguyuban adalah

perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan oleh orang-orang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan) diantara para anggotanya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001:811). Lebih lanjut dikatakan Soekanto (1990:132) bahwa: “Paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama dimana anggota-anggotanya diikat oleh hubungan bathin yang murni dan bersifat alamiah serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan bathin yang memang telah dikodratkan. Kehidupan tersebut dinamakan juga bersifat nyata dan organis, sebagaimana dapat diumpamakan dengan organ tubuh manusia atau hewan. Bentuk Paguyuban terutama akan dapat dijumpai di dalam keluarga, kelompok kerabat, rukun tetangga, dan lain sebagainya.”

Lebih lanjut dikatakan oleh Tonnies (dalam Soekanto,1990:134) bahwa suatu paguyuban (*gemeinschaft*) mempunyai beberapa ciri pokok, yaitu: “ (a) *intimate*, hubungan yang menyeluruh yang mesra; (b) *private*, hubungan yang bersifat pribadi, yaitu khusus untuk beberapa orang saja; (c) *exclisive*, hubungan tersebut hanyalah untuk “kita” saja dan tidak untuk orang lain diluar “kita”

Dalam *gemeinschaft* atau paguyuban terdapat suatu kemauan bersama (*common will*), ada suatu pengertian (*understanding*) serta juga kaidah-kaidah yang timbul dengan sendirinya dari kelompok tersebut. Apabila terjadi pertentangan antara anggota suatu paguyuban, maka pertentangan tersebut tidak akan dapat diatasi dalam suatu hal saja. Hal ini disebabkan karena adanya hubungan yang menyeluruh antar anggota-anggotanya, tidak mungkin suatu pertentangan yang kecil diatasi, oleh karena pertentangan tersebut, akan menjalar kebidang-bidang lainnya.

Lebih lanjut dikatakan Tonnies (dalam Soekanto,1990:134) di dalam setiap masyarakat selalu dapat dijumpai salah-satu diantara tiga tipe paguyuban, yaitu:

- a. Paguyuban karena ikatan darah (*gemeinschaft by blood*) yaitu *gemeinschaft* atau paguyuban yang merupakan ikatan didasarkan pada ikatan darah atau keturunan onto: keluarga kelompok kekerabatan.
- b. Paguyuban karena tempat (*gemeinschaft of place*), yaitu suatu paguyuban yang terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal sehingga dapat saling tolong-menolong, contoh: RT, RW dan Arisan.
- c. Paguyuban karena jiwa-pikiran (*gemeinschaft of mind*)

2.3. Paguyuban Pasundan

Menelusuri ihawal Paguyuban Pasundan, tentunya tidak bisa lepas dari konteks arti dan makna dari Paguyuban Pasundan itu sendiri. Kata Paguyuban jika diuraikan menjadi paguyub-an dan dikembalikan kepada kata dasar guyub, berarti kompak dan memiliki makna kebersamaan, guyub berarti *sahate atawa satujuan* (sehati atau setujuan) dan paguyuban adalah perkumpulan organisasi *jalma-jalma nu sahate* (perkumpulan organisasi orang-orang yang sehati). Mengenai istilah Pasundan, jika diuraikan menjadi pa-sun-dan atau pa-sunda-an, berarti tatar sunda atau wilayah Sunda, memiliki makna tempat perhimpunannya etnis Sunda.

Etnis Sunda dalam kajian antropologis Indonesia, merupakan kelompok etnis terbesar kedua setelah etnis Jawa. Kelompok etnis Sunda memiliki spirit serta ciri-ciri kebudayaan yang mandiri dan merupakan salah satu tonggak penegak kebudayaan Indonesia. Oleh organisasi etnis terbesar se-Asia Tenggara, yang kemudian menamakan diri Paguyuban Pasundan, spirit dan ciri-ciri kebudayaan Sunda dijadikan landasan kekompakan dan kebersamaannya (guyub).

2.4. Konsep Pemilihan Kepala Daerah Langsung

Demokrasi dan pemilu bukanlah istilah yang asing dalam khalayak politik Indonesia, beberapa tahun setelah revolusi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1955 bangsa Indonesia telah berhasil menyelenggarakan pemilu pertama yang demokratis yang mempunyai arti penting bagi terbentuknya pemerintahan yang bercorak modern dan demokratis. Dalam pemilu itu dipilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Konstituante. Sebagaimana dinyatakan Feith (1962:201) keberhasilan pemilu 1955 telah menimbulkan optimisme yang besar bagi banyak kalangan akan masa depan Indonesia, baik dalam negeri maupun luar negeri. Tetapi setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila masa Orde Baru menurut Perspekrif Benda dalam Kristiadi (2005:234) dipahami sebagai lahirnya kembali perwatakan sebenarnya politik di Indonesia, yakni kebudayaan Jawa yang feodalis dan otoriter.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan pengalaman baru dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia. Perubahan penting dalam reformasi konstitusi di Indonesia adalah pemilihan umum yang demokratis, yakni pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu 2004 tidak hanya dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang *independent*, tetapi juga dilaksanakan secara langsung untuk menentukan anggota legislative dan eksekutif (Presiden). Selanjutnya tahun 2005 pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung.

Dalam sistem demokratis, pemilihan umum yang terbuka, bebas dan adil merupakan salah satu unsur penting. Bahkan pemilihan umum merupakan esensi demokrasi, karena dengan pemilihan umum ada mekanisme untuk menyeleksi pimpinan dan ada jaminan perubahan secara periodik kepemimpinan, sehingga dapat mencegah terjadinya kesewenangan pemimpin setelah duduk dalam kekuasaan. Schumpeter dalam Fitriyah (2005:292) menyebutkan ada dua mekanisme yang secara efektif dapat mencegah terjadinya penyelewengan kekuasaan dalam sistem yang demokratis, yaitu: (1) pemilihan umum yang regular, (2) kompetisi terbuka dan sederajat diantara partai-partai politik. Sedangkan menurut Rasyid (2000:118-119) ada empat alasan mengapa pemilihan umum dipandang sebagai unsur penting sistem politik demokratis, yaitu:

- 1) pemilihan umum merupakan prosedur dan mekanisme pendelegasian sebagai kedaulatan rakyat kepada penyelenggaraan negara, baik yang akan duduk dalam lembaga legislatif maupun eksekutif di pusat dan daerah. Untuk bertindak atas nama rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat.
- 2) pemilihan umum merupakan prosedur dan mekanisme pemindahan perbedaan aspirasi dan pertentangan kepentingan dari masyarakat ke dalam lembaga penyelenggaraan negara, baik di pusat maupun di daerah, untuk kemudian dibicarakan dan diputuskan secara beradab.
- 3) pemilihan umum merupakan prosedur dan mekanisme perubahan politik secara teratur/tertib dan periodik, baik perubahan sirkulasi elit politik maupun perubahan arah dan pola kebijakan publik.
- 4) pemilihan umum juga dapat digunakan sebagai prosedur dan mekanisme *engineering* untuk mewujudkan tatanan politik dan pola perilaku politik yang disepakati bersama.”

Sedangkan menurut Tambunan (1986:13), berpendapat bahwa: “Pemilihan Umum merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat pada hakekatnya merupakan pengakuan dan perwujudan daripada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan

pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan”.

Konsekuensi logis dari ketentuan tersebut maka penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, mempunyai derajat keterwakilan yang lebih tinggi, dan memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Kepala daerah mempunyai peranan yang sangat strategis dalam rangka pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, pemerataan, kesejahteraan masyarakat, memelihara hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah serta antar daerah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu, diperlukan figur kepala daerah yang mampu mengembangkan inovasi, berwawasan ke depan dan siap melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Konsekuensi logis dari ketentuan tersebut adalah bahwa pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara demokratis, artinya keberadaan kepala daerah harus memperoleh legitimasi masyarakat secara penuh. Disisi lain pemilihan kepala daerah secara demokratis tersebut sebagai manifestasi daripada wujud kedaulatan rakyat pada tingkat daerah yaitu, Provinsi, Kabupaten dan Kota dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan pemerintah lokal diberbagai negara menurut Riyadmaji (2003:218) terdapat tiga varian untuk menentukan kepala daerah: ”(1) dipilih secara langsung, (2) dipilih tidak langsung oleh dewan, (3) ditunjuk oleh pemerintah”. Dibanyak negara mekanisme tersebut jarang diperdebatkan sepanjang fungsi-fungsi pemerintahan di daerah dapat dilaksanakan secara optimal dan dirasakan oleh masyarakat.

Terlaksananya pilkada langsung menunjukkan adanya peningkatan demokrasi di Indonesia. Kadar demokrasi suatu negara ditentukan antara lain oleh seberapa besar peranan masyarakat dalam menentukan siapa diantara mereka yang dijadikan pejabat negara, baik ditingkat nasional maupun daerah yang dipilih langsung oleh rakyatnya, semakin tinggi kadar demokrasi dari negara tersebut. Sebuah keniscayaan dengan otonomi daerah dan desentralisasi, kadar partisipasi politik rakyat semakin tinggi, baik dalam memilih pejabat publik, mengawasi perilakunya, maupun dalam menentukan arah kebijakan publik. Paralel dengan itu, menurut pendapat Dahl (1989) mengatakan bahwa: ”demokrasi pada tingkat nasional hanya mungkin terbangun jika demokrasi juga berlangsung pada tingkat lokal”. Hadenius (1992:42) dalam Crossant mengatakan bahwa:”Suatu pemilu, termasuk pilkada langsung, disebut demokratis kalau memiliki makna dengan merujuk tiga kriteria, yaitu (1) keterbukaan, (2) ketepatan dan (3) keefektifan pemilu. Ketiga kriteria tersebut harus dipenuhi bukan hanya pada saat pemungutan suara saja, melainkan juga sewaktu dilakukan kampanye dan perhitungan suara, kriteria itu juga berarti kepala daerah yang dipilih benar-benar akan menduduki jabatannya”.

Keterbukaan mengandung tiga maksud bahwa akses pada pilkada harus terbuka bagi setiap warga negara (*universal suffrage*, atau hak pilih universal), akses warga yang terbuka berarti bahwa hak pilih benar-benar bersifat universal, seluruh warga negara dijamin memiliki hak pilih tanpa diskriminasi. Keterbukaan juga berarti persamaan nilai-nilai suara diseluruh warga negara tanpa terkecuali. Prinsi yang digunakan adalah *one person, one vote, one value*. Semua warga Negara dihitung sama.

Undang-Undang memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah secara demokratis dapat dilakukan melalui dua cara, pertama, pemilihan oleh DPRD, kedua pemilihan langsung oleh rakyat. Pasal 62 Undang-Undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD tidak mencantumkan tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah. Dengan demikian, makna pemilihan kepala daerah secara demokratis sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 adalah pemilihan secara langsung oleh rakyat. Ketentuan itu memberikan jawaban yang sangat jelas bahwa pemilu secara limitative telah ditentukan untuk memilih Presiden dan wakilnya, DPR, DPD dan DPRD dan bukan untuk memilih Kepala Daerah. Ini berarti pilkada bukan masuk dalam ranah pemilu. Untuk itu maka urusan pilkada bukan merupakan domain Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilu.

Lebih lanjut lagi dijelaskan oleh Ma'ruf, dalam Mubarak (2005:5-6) ada lima pertimbangan penting penyelenggaraan pemilihan kepala daerah langsung bagi perkembangan demokrasi di Indonesia yaitu: ”*Pertama*, Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat karena pemilihan Presiden dan wakil Presiden, DPD, DPR, bahkan Kepala Desa selama ini telah dilakukan secara langsung; *Kedua*, Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti yang diamandemen pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah, Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Hal ini telah diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; (3) Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (politik) bagi rakyat (*Civil education*); (4) Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat Otonomi Daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya ditentukan oleh pemimpin lokal. Semakin baik pemimpin lokal, maka komitmen dalam mewujudkan tujuan otonomi daerah, antara lain meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat; dan *Kelima*, Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi kepemimpinan nasional.”

Pemilihan kepala daerah langsung merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi pengembangan demokrasi di daerah. Tujuan utama pemilihan kepala daerah secara langsung diantaranya adalah menumbuhkan peran serta masyarakat secara luas. Dalam konteks ini pula pilkada diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pelaksanaan pilkada langsung tidak hanya dijiwai oleh semangat demokrasi, tetapi lebih penting lagi mengacu pada kaidah dan prinsip dasar Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Lindlof dan Meyer,(dalam Mulyana, 2001:148-149) memasukan semua penelitian naturalistik kedalam paradigma interpretif, varian-variannya mencakup teori dan prosedur yang dikenal sebagai etnografi, fenomenologi, etnometodologi, interaksionisme simbolik, psikologi lingkungan, analisis semiotika, dan studi kasus. Studi kasus adalah suatu eksplorasi dari sebuah sistem terbatas atau suatu kasus secara mendetail, pengumpulan data secara mendalam dari informasi-informasi (Creswell, 1998: 61).

4. Pembahasan.

4.1. Model Proses Komunikasi Politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Tahap Pertama dalam Pemilihan Gubernur Langsung Provinsi Jawa Barat Tahun 2008.

Pada hakikatnya proses komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain. Pikiran bisa merupakan gagasan, informasi, opini, dan lain-lain. Perasaan bisa berupa keyakinan, kepastian, keragu-raguan, kekhawatiran, kemarahan, dan sebagainya yang timbul dari lubuk hati, Effendy (2000:11)

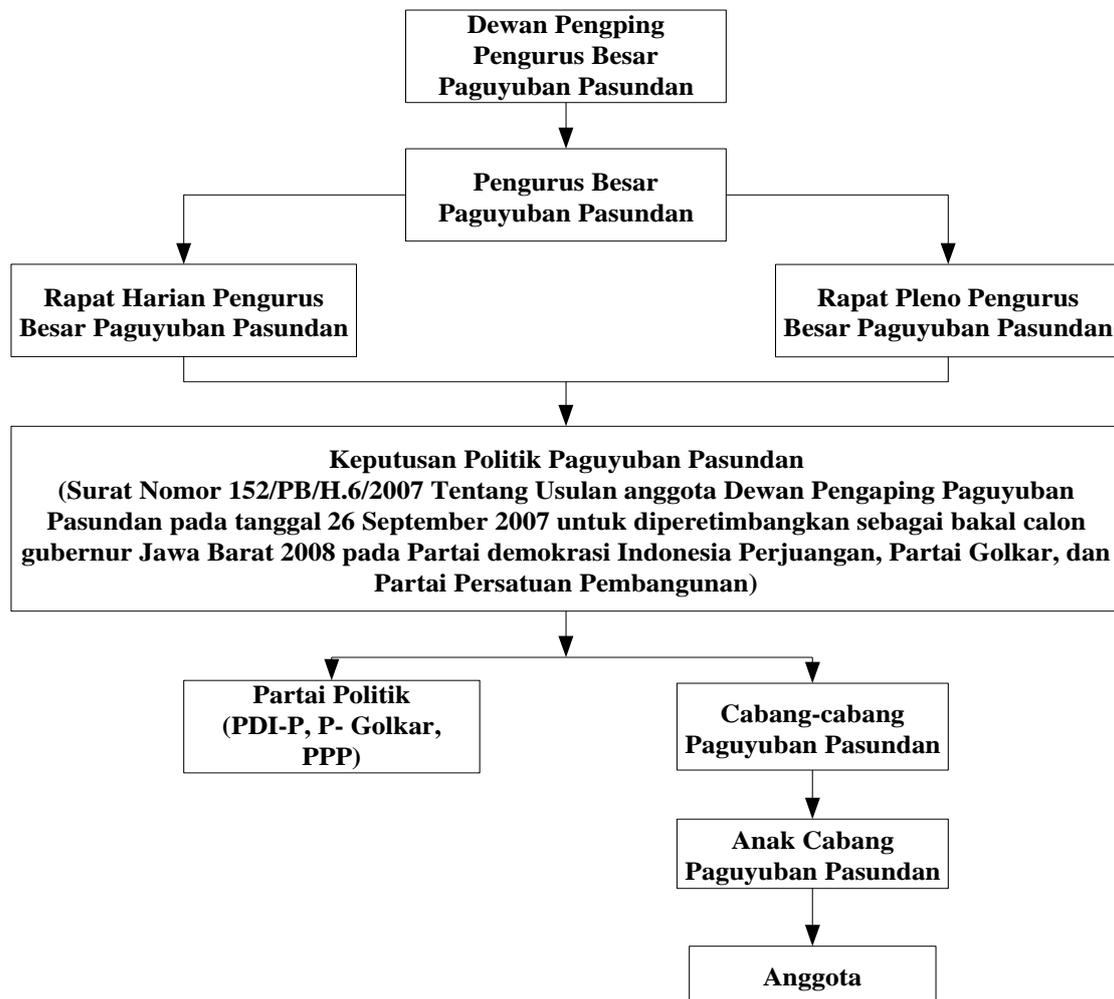
Dalam konteks ini proses komunikasi politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan Gubernur langsung Provinsi Jawa Barat tahun 2008 adalah rangkaian kegiatan yang ditempuh oleh Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam melakukan komunikasi politik dalam pemilihan Gubernur langsung Provinsi Jawa Barat tahun 2008. dalam konstelasi pemilihan gubernur secara langsung di Jawa Barat, Pengurus Besar Paguyuban Pasundan sadar atau tidak disadari bahwa, Pengurus Besar Paguyuban Pasundan terlibat dalam proses pemilihan gubernur tersebut. baik langsung maupun tidak langsung, karena menurut informan penelitian H. A. Syafe'i, Ketua Umum Pengurus Besar Paguyuban Pasundan menyebutkan bahwa: "Proses Komunikasi Politik yang dilakukan Pengurus Besar Paguyuban Pasundan yang sebenarnya terjadi kan ginni, Pak Agumkan Dewan Pengaping Paguyuban Pasundan dan belum mempunyai kendaraan politik, kemudian Pak Ginanjar (Ketua Dewan Pengaping) mengekspose didepan Pengurus harian Paguyuban dengan mendukung, malah tidak hanya mendukung mencalonkan malahan untuk Pak Agum menjadi kandidat calon Gubernur, hal itu sudah dirapatkan dengan pengurus harian.

Untuk menindaklanjuti itu kami (paguyuban) pelayangkan surat ke partai-partai pengusung Cagub, dan yang menanggapi hanya PDI-P, tapi itu bukan berarti kami ini PDI-P yah. "Logikanya gini Di' (peneliti) kalo Adi sebagai kandidat dan Adi itu anak saya ya harus saya dukung, begitu pula dengan Agum kan gitu Di'.."

Adapun proses komunikasi politik yang dilakukan Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan gubernur secara langsung di Provinsi Jawa Barat tahun 2008 malalui proses, yang pertama, Dewan Pengaping Pengurus Besar Paguyuban Pasundan sebagai lembaga konsultatif dalam Paguyuban Pasundan (melalui Ketuanya) melontarkan atau mengekspos calon gubernur pada pengurus Besar Paguyuban Pasundan, kedua Pengurus Besar Paguyuban Pasundan melakukan rapat tentang pembahasan calon gubernur baik itu rapat harian dan rapat pleno, ketiga keluarlah keputusan sikap politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam bentuk surat usulan anggota Dewan Pengaping Paguyuban Pasundan pada tanggal 26 September 2007 untuk diperetimbangkan sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat 2008 pada Partai demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan, dan keempat sosialisai akan keputusan itu pada partai-partai diatas dan cabang-cabang Paguyuban Pasundan.

Maka dapat dibuat model proses komunikasi politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan tahap pertama dalam pemilihan Gubernur langsung Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Maka dapat dibuat model proses komunikasi politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan tahap pertama dalam pemilihan Gubernur langsung Provinsi Jawa Barat Tahun 2008, seperti yang dapat dilihat dalam Gambar 4.1.

Gambar 4.1.
Model Proses Komunikasi Politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Tahap Pertama
dalam Pemilihan Gubernur Langsung Provinsi Jawa Barat Tahun 2008



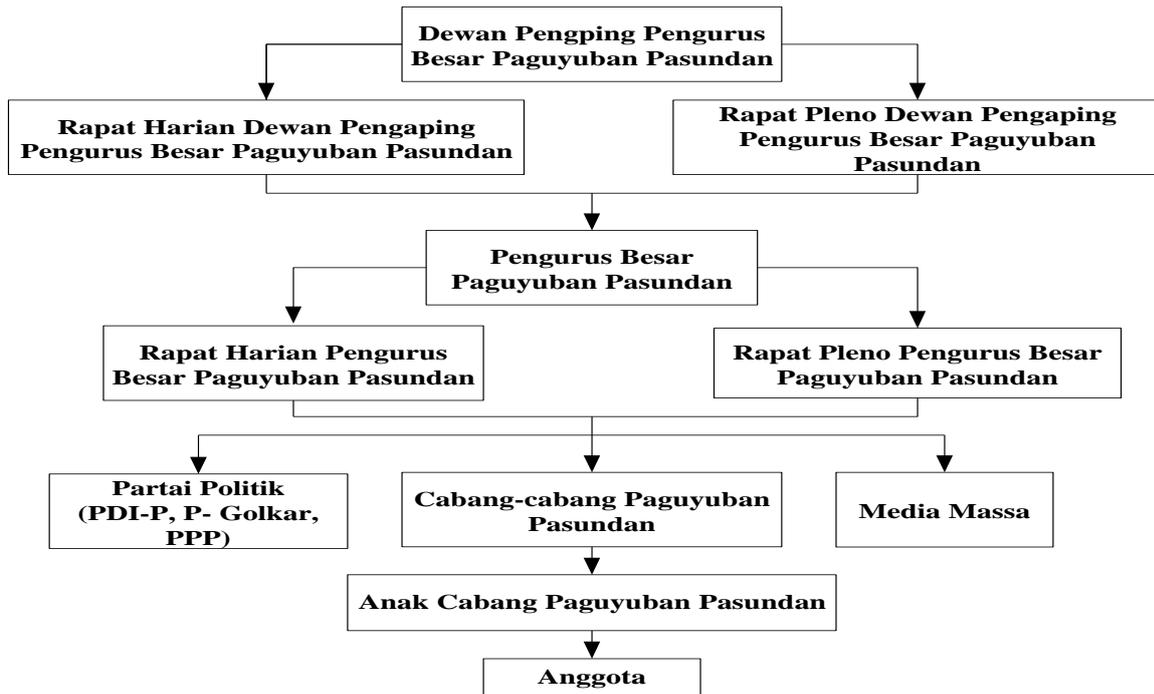
4.2. Model Proses Komunikasi Politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Tahap Kedua dalam Pemilihan Gubernur Langsung Provinsi Jawa Barat Tahun 2008.

Adapun perubahan proses komunikasi politik yang dilakukan Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan gubernur secara langsung di Provinsi Jawa Barat tahun 2008 melalui proses, yang pertama, Dewan Pengaping Pengurus Besar Paguyuban Pasundan sebagai lembaga konsultatif dalam Paguyuban Pasundan melakukan rapat baik itu rapat harian maupun rapat pleno untuk menentukan sikap politik dalam pemilihan gubernur secara langsung di Jawa Barat tahun 2008 kemudian disampaikan pada pengurus Besar Paguyuban Pasundan. Kedua Pengurus Besar Paguyuban Pasundan

melakukan rapat tentang sikap politik yang sudah menjadi keputusan Dewan pengaping dalam pemilihan gubernur secara langsung di Jawa Barat tahun 2008 , ketiga keluarlah keputusan sikap politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan bahwa Paguyuban Pasundan bersikap netral dalam pemilihan gubernur Jawa Barat April 2008, pernyataan sikap politik ini disampaikan oleh wakil Dewan Pengaping Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Popong Otje Djundjungan dalam konfrensi persnya di sekretariat Paguyuban Pasundan Jln. Sumatra No. 41 Bandung (Pikiran Rakyat 9 Februari 2008), dan keempat sosialisai akan keputusan itu pada

partai-partai diatas dan cabang-cabang Paguyuban Pasundan. Maka dapat dibuat model proses komunikasi politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan tahap kedua dalam pemilihan Gubernur langsung Provinsi Jawa Barat Tahun 2008, seperti yang dapat dilihat dari Gambar 4.2.

Gambar 4.2.
Model Proses Komunikasi Politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Tahap
Kedua dalam Pemilihan Gubernur Langsung Provinsi Jawa Barat Tahun 2008



4.3. Budaya Komunikasi Politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam Pemilihan Gubernur Secara Langsung di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008

Menurut Anugrah dalam tesisnya (2004), mengatakan bahwa terdapat ciri-ciri umum yang berkenaan dengan budaya komunikasi politik di Indonesia, antara lain (1) budaya komunikasi politik Indonesia cenderung tidak terbuka, terutama pada kritik meskipun dianggap konstruktif, (2) terbentuk budaya komunikasi politik yang sulit terus terang sehingga komunikasi politik penuh dengan penghalusan (eufemisme), (3) meskipun kritik diperbolehkan, tetapi gagasan kritik sosial tersebut disampaikan secara simbolik dan teaterikal, bentuknya harus sopan, halus, tidak agresif, dan disampaikan melalui medium cenda gurau.

Budaya komunikasi politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan gubernur secara langsung di Provinsi Jawa Barat tahun 2008, yang terbangun adalah budaya komunikasi politik cenderung tidak terbuka dan terbentuk budaya komunikasi politik yang sulit terus terang sehingga komunikasi politik penuh dengan penghalusan (*eufemisme*) sehingga proses komunikasi politik yang terjadi bias walaupun sudah menjadi keputusan politik Paguyuban Pasundan, lebih lanjut lagi dikatakan informan penelitian yang tidak mau disebutkan

namanya mengatakan bahwa, “budaya komunikasi tertutup ini hanya ditingkat elit-elit tertentu terjadi pada saat kepengurusan sekarang saja”. Kemudian budaya yang berkembang dalam Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan Gubernur secara langsung di Jawa Barat tahun 2008 tergolong ke dalam pengertian budaya komunikasi *ewuh pakewuh* (merasa tidak enak pada orang yang lebih tua tanpa didasari benar atau salah) kalo dalam budaya politik disebut kaula-parokial, sehingga komunikasi yang terbangun tidak didasari pada nilai-nilai budaya ke-Sundaan dan platform Paguyuban Pasundan itu sendiri, sehingga keputusan dari produk proses komunikasi politik yang dilakukan baik itu internal Paguyuban Pasundan maupun dengan partai politik menjadi bias dan terkesan Paguyuban Pasundan tidak mempunyai sikap atau keputusan politik yang tegas dalam pemilihan gubernur secara langsung di provinsi Jawa Barat tahun 2008.

4.4. Faktor-faktor yang Mendasari Komunikasi Politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam Pemilihan Gubernur Secara Langsung di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008

Berdasarkan hasil penelitian dengan wawancara secara mendalam dan observasi terhadap Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, maka hasilnya didapatkan faktor yang mendasari komunikasi politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan gubernur langsung di Provinsi Jawa Barat tahun 2008 , sebagai berikut:

1. Potensi yang dimiliki oleh Paguyuban Pasundan, Paguyuban yang kaya akan tokoh-tokoh (potensi) baik ditingkat nasional maupun ditingkat lokal Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan bahwa faktor potensi yang dimiliki Paguyuban Pasundan yang paling dominan dalam pemilihan gubernur langsung di Provinsi Jawa Barat tahun 2008, artinya bahwa yang menjadi suatu hal yang sangat mendasar ketika ada proses politik ditingkat lokal Jawa Barat yang notabene adalah pusat dari Paguyuban Pasundan, namun dalam pembahasan sebelumnya dalam tesis ini sesuatu yang baik akan menjadi hal yang bias ketika melihat peranan yang dilakukan Paguyuban Pasundan seperti dalam pemilihan gubernur Jawa Barat tahun 2008, seharusnya Paguyuban Pasundan menjadi motor penggerak dan panutan masyarakat ditatar Sunda untuk dapat memilih calon pemiminya agar cita-cita mendorong terwujudnya masyarakat Sunda yang memiliki jati diri dan kemampuan mengembangkan diri dalam kerangka nasional maupun global, artinya bahwa cita-cita tersebut bisa diawali dari kiprah Paguyuban Pasundan dalam proses politik lokal dengan mendorong potensi figur yang dimiliki Paguyuban Pasundan yang diyakini mampu dan mempunyai kredibilitas untuk memimpin Jawa Barat ke depan.
2. Faktor eksistensi Paguyuban Pasundan dalam ranah politik lokal Jawa Barat

Faktor lain yang mendasari mendasari komunikasi politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan gubernur langsung di Provinsi Jawa Barat tahun 2008 adalah bahwa memang setelah penulis melakukan penelitian, maka terdapat sesuatu hal yang memang saat ini mungkin eksistensi Paguyuban Pasundan selalu dipertanyakan oleh masyarakat di Tatar sunda maupun ditingkat nasional, keterlibatan Paguyuban Pasundan dalam proses politik ditingkat loka membuktikan bahwa Paguyuban Pasundan mempunyai peranan, namun keterlibatan dan eksistensi yang dilakukan oleh Paguyuban Pasundan masih menjadi tanda tanya apakah memang peranan Paguyuban Pasundan atau eksistensinya seperti tidak terwujudkan dengan harapan-harapan masyarakat, dengan menjadi teladan paling tidak menjadi contoh yang mumpuni untuk masyarakat ditatar Sunda.

4.5. Realitas Politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam Pemilihan Gubernur Secara Langsung di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008

Realitas yang terjadi bahwa ada ambiguitas sikap politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan gubernur secara langsung di Provinsi Jawa Barat tahun 2008, menurut interpretasi peneliti setelah melakukan penelitian dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi adalah kegamangan sikap politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, artinya bahwa saat proses pemilihan gubernur kandidat yang meramaikan bursa calon gubernur dua dari tiga adalah Dewan Pengasing Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, sehingga yang terjadi adanya polarisasi sikap politik terhadap figur calon gubernur, polarisasi itu antara lain bahwa Pengurus Besar Paguyuban Pasundan ada yang mendukung Agum Gumelar dan satu sisi ada yang mendukung Dani Setiawan pada saat pemilihan gubernur di Jawa Barat. Lain hal ketika pemilihan gubernur di DKI Jakarta, Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam menentukan sikap politik menjadi keputusan politik tidak terjadi polarisasi karena dukungan seluruhnya jatuh pada Adang Dorodjatun dengan pernyataan Sekretaris Jendral Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Didi Turmudzi menyatakan dukungan secara formal, bahkan beliau langsung membacakan pernyataan di depan para undangan dalam acara kunjungan Adang Dorodjatun ke Sekertariat Paguyuban Pasundan di Bandung, Senin, 25 Juni 2007.

Pergulatan Wacana Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam Pemilihan Gubernur Langsung Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 yang menjadi realitas dalam pemilihan gubernur Jawa Barat tahun 2008, ini dipertegas dengan hasil wawancara peneliti dengan informan H. Aan Burhanudin mengatakan bahwa, “ada pergulatan wacana pada Pilgub kemarin tentang calon gubernur, dan tarik menarik wacana tentang siapa calon gubernur kedepan, walaupun keputusan atau sikap politik sudah dirapatkan dan hasilnya adalah surat usulan calon gubernur ke partai-partai politik, itu semua bias dan keluarlah keputusan baru lagi bahwa Paguyuban Pasundan bersikap netral dalam pemilihan gubernur Jawa Barat tahun 2008” Dalam proses tahap pertama terjadi perbedaan pemaknaan terhadap produk dari proses komunikasi politik yang dilakukan dan juga peneliti menginterpretasikan bahwa pergulatan wacana juga di dalam Pengurus Besar Paguyuban Pasundan akibat dari perbedaan sikap politik individu-individu di dalam Paguyuban Pasundan itu sendiri akibatnya adalah tidak ada persamaan tentang siapa figur yang pantas untuk Jawa Barat ke depan karena Paguyuban Pasundan berbagai kepentingan dan golongan ada didalamnya.

4.6. Kategori Kelompok Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam Pemilihan Gubernur Secara Langsung di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008

Dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2008 juga ada tiga kategori kelompok Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam memandang pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2008, kategori itu antara lain:

- a) Pengurus Besar Paguyuban Pasundan yang sepakat mendukung salah satu calon gubernur dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2008 . Kelompok ini berpandangan bahwa Paguyuban Pasundan harus terlibat dalam ranah politik apalagi di Jawa Barat sebagai pusat Paguyuban Pasundan, serta Paguyuban Pasundan harus punya sikap politik agar mampu untuk memberikan masukan-masukan untuk kemajuan Jawa Barat ke depan.
- b) Pengurus Besar Paguyuban Pasundan yang sepakat mendukung asal pasti menang calon gubernur dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2008

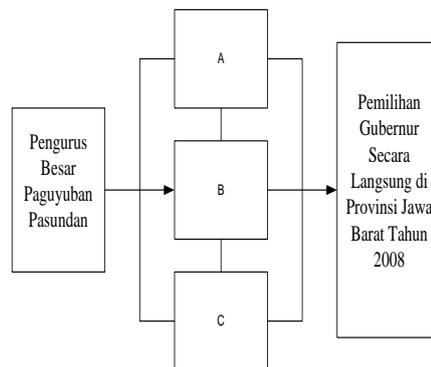
Kelompok ini berpandangan bahwa Paguyuban Pasundan kalo mendukung salah satu calon gubernur harus *all out* tidak setengah-setengah agar kandidat yang diusung menang karena Paguyuban Pasundan mempunyai potensi besar baik itu intelektual, maupun anggotanya sehingga Paguyuban Pasundan mempunyai peranan yang besar dalam perolehan suara.

- c) Pengurus Besar Paguyuban Pasundan yang tidak setuju dengan masalah dukung mendukung calon gubernur pada pemilihan gubernur Jawa Barat tahun 2008.

Kelompok yang terakhir ini berpandangan bahwa Paguyuban Pasundan itu bukan organisasi politik, dengan dasar-dasar aturan AD/ART yang dipegang bahwa Paguyuban Pasundan tidak boleh terjun pada politik praktis seperti masa lalu (Paguyuban Pasundan sejak tahun tahun 1919 sehubungan dibentuknya *Volkstraad* melakukan kegiatan dibidang politik, perubahan perkumpulan yang semula bergerak di bidang sosial-budaya menjadi perkumpuln politik ditunjukkan oleh Anggaran Dasarnya yang telah diadakan beberapa perubahan dan disahkan oleh pemerintah dengan surat keputusan No. 72, tanggal 13 Juni 1919) karena Paguyuban Pasundan itu adalah organisasi kemasyarakatan yang berkiprah dalam bidang sosial, budaya dan pendidikan (Soeharto, 2002: 80). Adapun kategori kelompok Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan gubernur secara langsung di provinsi Jawa barat tahun 2008, maka bisa dibuat bagan sebagai berikut:

Gambar 4.3

Kategori Kelompok PB paguyuban Pasundan dalam Pemilihan Gubernur 2008



- A : Pengurus Besar Paguyuban Pasundan yang sepakat mendukung salah satu calon gubernur dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2008
- B : Pengurus Besar Paguyuban Pasundan yang sepakat mendukung asal pasti menang calon gubernur dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2008
- C : Pengurus Besar Paguyuban Pasundan yang tidak setuju dengan masalah dukung mendukung calon gubernur pada pemilihan gubernur Jawa Barat tahun 2008.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas mengenai komunikasi politik Paguyuban Pasundan dalam pemilihan kepala daerah langsung studi kasus pada Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan gubernur secara langsung di Provinsi Jawa Barat tahun 2008, maka dapat dibuat kesimpulan, sebagai berikut:

5.1.1 Proses Komunikasi Politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam Pemilihan Gubernur Langsung Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 adalah berdasarkan dua tahap

1) Proses tahap pertama

Dalam hal ini komunikasi politik memainkan peranan yang amat penting dalam pengambilan keputusan untuk menentukan sikap politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan. Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dituntut untuk menjalin kerjasama, hubungan, dan komunikasi yang baik. Dalam konteks ini komunikasi politik diartikan sebagai hubungan, dialog, pertukaran pikiran atau pendapat, debat, pertemuan, serta segala macam “transfer lambang”.

Adapun proses komunikasi politik tahap yang dilakukan Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan gubernur secara langsung di Provinsi Jawa Barat tahun 2008 melalui proses, yang pertama, Dewan Pengapung Pengurus Besar Paguyuban Pasundan sebagai lembaga konsultatif dalam Paguyuban Pasundan (melalui Ketuaanya) melontarkan atau mengekspos calon gubernur pada pengurus Besar Paguyuban Pasundan, kedua Pengurus Besar Paguyuban Pasundan melakukan rapat tentang pembahasan calon gubernur baik itu rapat harian dan rapat pleno, ketiga keluarlah keputusan sikap politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam bentuk surat usulan anggota Dewan Pengapung Paguyuban Pasundan pada tanggal 26 September 2007 untuk dipertimbangkan sebagai bakal calon gubernur Jawa Barat 2008 pada Partai demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Persatuan Pembangunan, dan keempat sosialisai akan keputusan itu pada partai-partai diatas dan cabang-cabang Paguyuban Pasundan.

2) Proses tahap kedua

Sebagaimana pembahasan faktor-faktor yang merubah proses komunikasi politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan tahap pertama dalam pemilihan gubernur langsung di provinsi Jawa Barat Tahun 2008, ada perubahan proses komunikasi politik yang dilakukan Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan gubernur secara langsung di Provinsi Jawa Barat sebagai dampak dari proses komunikasi politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan tahap pertama dalam pemilihan gubernur langsung di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008.

Adapun perubahan proses komunikasi politik yang dilakukan Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan gubernur secara langsung di Provinsi Jawa Barat tahun 2008 melalui proses, yang pertama, Dewan Pengapung Pengurus Besar Paguyuban Pasundan sebagai lembaga konsultatif dalam Paguyuban Pasundan melakukan rapat baik itu rapat harian maupun rapat pleno untuk menentukan sikap politik dalam pemilihan gubernur secara langsung di Jawa Barat tahun 2008 kemudian disampaikan pada pengurus Besar Paguyuban Pasundan, kedua Pengurus Besar Paguyuban Pasundan melakukan rapat tentang sikap politik yang sudah menjadi keputusan Dewan pengapung dalam pemilihan gubernur secara langsung di Jawa Barat tahun 2008 , ketiga keluarlah keputusan sikap politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan bahwa Paguyuban Pasundan bersikap netral dalam pemilihan

gubernur Jawa Barat April 2008, pernyataan sikap politik ini disampaikan oleh wakil Dewan Pengaping Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Hj. Popong Otje Djundjuran dalam konfrensi persnya di sekretariat Paguyuban Pasundan Jln. Sumatra No. 41 Bandung, dan keempat sosialisasi akan keputusan itu pada partai-partai di atas dan cabang-cabang Paguyuban Pasundan.

Budaya Komunikasi Politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan gubernur langsung di Provinsi Jawa Barat tahun 2008. Menurut Anugrah dalam tesisnya (2004), mengatakan bahwa terdapat ciri-ciri umum yang berkenaan dengan budaya komunikasi politik di Indonesia, antara lain (1) budaya komunikasi politik Indonesia cenderung tidak terbuka, terutama pada kritik meskipun dianggap konstruktif, (2) terbentuk budaya komunikasi politik yang sulit terus terang sehingga komunikasi politik penuh dengan penghalusan (*eufemisme*), (3) meskipun kritik diperbolehkan, tetapi gagasan kritik sosial tersebut disampaikan secara simbolik dan teaterikal, bentuknya harus sopan, halus, tidak agresif, dan disampaikan melalui medium cendak gurau.

Budaya komunikasi politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan gubernur secara langsung di Provinsi Jawa Barat tahun 2008, yang terbangun adalah budaya komunikasi politik cenderung tidak terbuka dan terbentuk budaya komunikasi politik yang sulit terus terang sehingga komunikasi politik penuh dengan penghalusan (*eufemisme*) sehingga proses komunikasi politik yang terjadi bias walaupun sudah menjadi keputusan politik Paguyuban Pasundan. Kemudian budaya yang berkembang dalam Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan Gubernur secara langsung di Jawa Barat tahun 2008 tergolong ke dalam pengertian budaya komunikasi *ewuh pakewuh* (merasa tidak enak pada orang yang lebih tua tanpa didasari benar atau salah) kalo dalam budaya politik disebut kaula-parokial, sehingga komunikasi yang terbangun tidak didasari pada nilai-nilai budaya ke-Sundaan dan platform Paguyuban Pasundan itu sendiri, sehingga keputusan dari produk proses komunikasi politik yang dilakukan baik itu internal Paguyuban Pasundan maupun dengan partai politik menjadi bias dan terkesan Paguyuban Pasundan tidak mempunyai sikap atau keputusan politik yang tegas dalam pemilihan gubernur secara langsung di Provinsi Jawa Barat tahun 2008.

Faktor-faktor yang mendasari komunikasi politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan gubernur langsung di Provinsi Jawa Barat tahun 2008.

Faktor yang mendasari komunikasi politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan gubernur langsung di Provinsi Jawa Barat tahun 2008, antara lain:

- (1) Faktor potensi yang dimiliki oleh Paguyuban Pasundan, Paguyuban yang kaya akan tokoh-tokoh (potensi) baik ditingkat nasional maupun ditingkat lokal. Jika kita melihat Pengurus Besar Paguyuban Pasundan yang memiliki harapan agar Jawa Barat ke depan lebih maju dalam segala bidang. Hal inilah yang mendorong untuk melakukan komunikasi politik baik intern Paguyuban maupun dengan partai-partai.
- (2) Faktor eksistensi Paguyuban Pasundan dalam ranah politik lokal Jawa Barat

Realitas politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan Gubernur pemilihan gubernur langsung di Provinsi Jawa Barat tahun 2008.

Realitas politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam Pilgub Jawa Barat 2008, nampak jelas bahwa komunikasi politik yang dilakukan Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat 2008 dalam menghubungkan pikiran-pikiran politik

yang terjadi di dalam tubuh Paguyuban Pasundan itu sendiri tidak ada persamaan makna, maka yang terjadi terkesan adanya konflik atau friksi, hasil observasi langsung bahwa itu terlihat dua elit Pengurus Besar Paguyuban Pasundan masing-masing mempunyai sikap politik yang berbeda sehingga terjadi ambiguitas dalam memutuskan sikap politik organisasi.

Ada ambiguitas sikap politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam pemilihan gubernur secara langsung di Provinsi Jawa Barat tahun 2008, menurut interpretasi peneliti setelah melakukan penelitian dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi adalah kegamangan sikap politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, artinya bahwa saat proses pemilihan gubernur kandidat yang meramaikan bursa calon gubernur dua dari tiga adalah Dewan Pengapung Pengurus Besar Paguyuban Pasundan, sehingga yang terjadi adanya polarisasi sikap politik terhadap figur calon gubernur, polarisasi itu antara lain bahwa Pengurus Besar Paguyuban Pasundan ada yang mendukung agum Gumelar dan satu sisi ada yang mendukung Dani Setiawan pada saat pemilihan gubernur di Jawa Barat.

Lain hal ketika pemilihan gubernur di DKI Jakarta, Pengurus Besar Paguyuban Pasundan dalam menentukan sikap politik menjadi keputusan politik tidak terjadi polarisasi karena dukungan seluruhnya jatuh pada Adang Dorodjatun dengan pernyataan Sekertaris Jendral Pengurus Besar Paguyuban Pasundan Didi Turmudzi menyatakan dukungan secara formal, malah beliau langsung membacakan pernyataan di depan para undangan dalam acara kunjungan Adang Dorodjatun ke Sekertariat Paguyuban Pasundan di Bandung, Senin, 25 Juni 2007.

5.2. Saran

5.2.1. Saran untuk pengembangan ilmu

- 1) Komunikasi politik adalah kajian yang sangat menarik dan mempunyai banyak aspek untuk terus dijadikan bahan penelitian. Sehingga bagi peneliti lainnya yang berminat tentang komunikasi politik, dapat meneliti bagaimana komunikasi politik yang dilakukan Ormas-ormas lainnya dalam proses Pemilihan kepala daerah langsung, baik di Jawa Barat atau di Provinsi lain.
- 2) Penelitian lain, bisa lebih difokuskan mengenai aspek budaya komunikasi politik dalam sebuah organisasi kemasyarakatan dalam membangun budaya komunikasi politik sehingga budaya komunikasi politik didalam internal organisasi maupun eksternal berjalan baik dengan keterbukaan sehingga proses pemaknaan pertukaran simbol (bahasa) politik mampu meminimalisir pemaknaan yang tidak sesuai dengan tujuan komunikasi politik itu sendiri
- 3) Bisa dilakukan penelitian yang sama mengenai komunikasi politik organisasi kemasyarakatan yang mempunyai eksistensi dalam ranah politik, tetapi di lokasi penelitian lain, sehingga ada temuan yang unik mengenai komunikasi politik organisasi kemasyarakatan yang lain.
- 4) Penelitian ini bisa juga menggunakan perspektif fenomenologi Alfred Schutz. Mengungkap motif-motifnya.

5.2.2. Saran untuk pengembangan praktis

- 1) Komunikasi politik merupakan komunikasi yang dapat menjembatani dan memperlancar terjadinya komunikasi antar peserta komunikasi dalam hal ini komunikasi politik Pengurus Besar Paguyuban Pasundan baik itu internal maupun eksternal. Artinya, komunikasi politik itu sangat efektif, menjembatani berbagai

kepentingan ketika masing-masing peserta secara timbal balik menyampaikan pesan ataupun memberikan respon baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal.

- 2) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pemikiran bagi Pengurus Besar Paguyuban Pasundan untuk bagaimana membangun komunikasi politik yang baik, baik itu internal maupun eksternal.
- 3) Untuk mengatasi kegagalan dalam proses komunikasi, maka masing-masing peserta komunikasi politik harus saling memahami bahwa perbedaan yang ada hanya sebatas perbedaan kepentingan dan pemikiran. Untuk itu, intensitas dalam melakukan komunikasi politik diharapkan mampu meminimalisir perbedaan itu.

Daftar Pustaka

Buku:

- Althoff, Phillip., dan Michael Rush. 1997. *Pengantar Sosiologi Politik*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Alwi, Hasan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta :Balai Pustaka.
- Anugrah, Dadan. 2004. *Reformasi dan Perubahn Budaya Komunikasi Politik (studi Kasus tentang Komunikasi Politik di DPRD Kabupaten Subang)*. Bandung : Tesis Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran (Unpad)
- Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Politik, Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi & Komunikasi Politik Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Beetham, David and Kevin Boyle. 2000. *Demokrasi 80 Tanya Jawab (terjemahan dari Introducing Democracy: 80 Question and Answers)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Erawan, Memed dan Daum Sumardi dkk. 2000. *Paguyuban Pasundan Kiprah dan Perjuangannya dari Zaman ke Zaman*. Bandung: Pengurus Besar Paguyuban Pasundan
- Blake, Red H., dan Edwin O. Haroldsen .1979. *A Taxonomy of Concepts in Communication*, Toronto, Hasting House Publisher.
- Budiardjo, Miriam .1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*,Bandung: PT Gramedia Pustaka Utama
- Craib, Ian. 1994. *Teori-teori Sosial Modern*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Creswell, Jhon W., 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design; hoosing Among Five Traditions*, Sage Publication, California.
- Creswell, Jhon W., 1998. *Qualitatif Inquiry and Research Design; hoosing Among Five Traditions*, Sage Publication, California.
- Mubarok, M.Mufti. 2005. *Sukses Pilkada, Jurus Memenangkan Pilkada Langsung*. Surabaya: Jaya Pustaka Media Utama.
- Mulyana, Deddy 2001. *Metodelogi Penelitian Kualitatif. Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung, Rosda Karya.
- Nimmo, Dan D. 1978. *Political Communication and Public Opinion in America*, California: Goodyear Publishing Company
- Soekanto, Soerjono,. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suharto,. 2002. *Pagoejoeban Pasoendan 1927-1942 Profil Pergerakan etno-Nasionalis*. Bandung:Satya Historika
- Tambunan, A.S.S. 1986. *Pemilu di Indonesia dan Susunan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD*. Bandung: Bina Cipta
- Golding, Peter. 1996. *Communication Politics, Mass Communication and the political Process*. America: Liecester University Press
- Varma, SP. 2007. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Raja Grafindo Persada